

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 91 TAHUN 2021 TENTANG ANGKUTAN UMUM GRATIS (STUDI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BALANGAN)

Sirli Agustina¹, Siti Raudah², Yusran Fahmi³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
Email: sirlibalangan@gmail.com

ABSTRAK

Untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi polusi udara dan merintis Kembali penyelenggaraan angkutan umum di Kabupaten Balangan, maka pemerintah menggagas untuk merancang kebijakan, seperti Peraturan Bupati Balangan Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Angkutan Umum Gratis namun dalam pelaksanaannya masih terkendala beberapa hal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Angkutan Umum Gratis belum optimal karena kurangnya Armada Angkutan dikarenakan minimnya anggaran yang disediakan. Berdasarkan hal tersebut disarankan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan hendaknya lebih melakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat terkait angkutan umum gratis mislanya setiap 3 bulan sekali dan lebih memperhatikan lagi sarana dan prasarana dalam menunjang pelayanan tersebut. Kepada masyarakat hendaknya memanfaatkan dan menggunakan layanan angkutan umum gratis sesuai peraturan yang ada.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Bupati, Angkutan Umum Gratis

ABSTRACT

To reduce the use of private vehicles, reduce air pollution and restart the implementation of public transportation in Balangan Regency, the government has taken the initiative to design policies, such as Balangan Regent Regulation Number 91 of 2021 concerning Free Public Transportation, but its implementation is still hampered by several things. This research uses a qualitative approach with a qualitative descriptive type. The results of the research show that the implementation of Balangan Regent's Regulation Number 91 of 2021 concerning Free Public Transport is not optimal due to the lack of transport fleets due to the minimal budget provided. Based on this, it is recommended that the Head of the Balangan Regency Transportation Service should carry out more routine outreach to the public regarding free public transportation, for example once every 3 months and pay more attention to the facilities and infrastructure to support this service. The public should utilize and use free public transportation services in accordance with existing regulations.

Keywords: Implementation, Regent's Regulations, Free Public Transportation.

PENDAHULUAN

Persoalan terkait transportasi tidak hanya berkaitan dengan permasalahan kemacetan semata, akan tetapi kecelakaan lalu lintas juga termasuk permasalahan yang perlu disikapi oleh pemerintah. Pelayanan angkutan umum adalah sebuah fungsi kota yang sangat mendasar bagi kehidupan masyarakatnya. Oleh karenanya angkutan umum merupakan salah satu fasilitas dan layanan yang wajib disediakan oleh pemerintah. Kebutuhan akan transportasi umum sangat tergantung pada kepadatan, ukuran, dan pola pemukiman kota. Dengan demikian, perencanaan angkutan umum harus diintegrasikan dengan perencanaan yang komprehensif. Pengembangan sistem angkutan di suatu kota harus dimulai dengan identifikasi masalah yang tidak terlepas dari posisi sistem angkutan umum dalam sistem ekonomi kota. Tidaklah efisien jika penyelesaian

masalah hanya didasarkan kepada perbaikan sistem operasi, dengan menisbikan permasalahan lain dalam perusahaan angkutan umum, penataan ruang kota, dan lain sebagainya. Idealnya penyelenggaraan angkutan umum perkotaan didasarkan pada jaringan trayek yang berjenjang sesuai dengan pola dan besar pergerakan penumpang yang hendak dilayani.

Dengan demikian, perencanaan angkutan umum harus diintegrasikan dengan perencanaan yang komprehensif. Pengembangan sistem angkutan di suatu kota harus dimulai dengan identifikasi masalah yang tidak terlepas dari posisi sistem angkutan umum dalam sistem ekonomi kota. Tidaklah efisien jika penyelesaian masalah hanya didasarkan kepada perbaikan sistem operasi, dengan menisbikan permasalahan lain dalam perusahaan angkutan umum, penataan ruang kota, dan lain sebagainya. Idealnya penyelenggaraan angkutan umum perkotaan didasarkan pada jaringan trayek yang berjenjang sesuai dengan pola dan besar pergerakan penumpang yang hendak dilayani. Pola perjalanan angkutan penumpang di perkotaan sangat dipengaruhi oleh tata ruang yang direncanakan untuk kota tersebut

Penataan sistem transportasi harus dilakukan secara terpadu sebagai satu kesatuan sistem transportasi nasional agar mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan permintaan pelanggan, yang layak dengan biaya murah sehingga dapat terjangkau oleh seluruh rakyat. Salah satu aspek transportasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak adalah angkutan umum. Pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan di wilayah perkotaan di Indonesia diarahkan untuk menciptakan pelayanan yang handal dan pada jangka panjang, diharapkan keberadaan pelayanan angkutan umum yang handal akan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan kendaraan pribadi.

Untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi polusi udara dan merintis Kembali penyelenggaraan angkutan umum di Kabupaten Balangan, maka pemerintah menggagas untuk merancang kebijakan, seperti Peraturan Bupati Balangan Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Angkutan Umum Gratis.

Namun berdasarkan observasi peneliti, pelaksanaan kebijakan tersebut masih terkendala beberapa hal khususnya untuk Masyarakat, diantaranya : Permasalahan pertama, masyarakat datang pada titik jemputan tidak sesuai dengan Jam yang ditentukan seperti :

1. Rit 1 dari jam 07.30 sampai 08.00, sedangkan Masyarakat datang jam 09.00. Belum sesuai jadwal yang sudah ditentukan.
2. Permasalahan kedua keterbatasan berbagai hal seperti : Terbatasnya anggaran untuk manajemen angkutan umumnya dan terbatasnya perbaikan berkala service angkutan umum yang digunakan, seperti untuk perbaikan ban yang sudah tidak layak pakai.
3. Permasalahan ketiga kurangnya Unit Angkutan, yang tersedia hanya 1 Unit Angkutan, Sedangkan melihat dari tujuan Trayek yang di butuhkan Masyarakat yaitu 3 Unit Angkutan.

METODE

Lokasi penelitian ini, akan dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan yang beralokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani KM 5,5 Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kode pos 71462, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui informan dengan teknik *purposive Sampling* berjumlah 13 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengujian kredibilitas data melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi dan *member check*

PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Angkutan Umum Gratis adalah sebuah penelitian. Dengan teori penelitian yang digunakan berdasarkan teori George C. Edward III sebagaiberikut :

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses dimana seseorang atau beberapa orang kelompok organisasi lembaga maupun masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi maupun berupa pemberitahuan agar terhubung dengan setiap lingkungannya.

a. Transmisi Kebijakan

Transmisi sering dikaitkan dengan proses interaksi manusia. dengan adanya kejelasan informasi yang diberikan dalam suatu kebijakan, maka akan semakin mudah masyarakat untuk dapat memahami dan menerapkan kebijakan tersebut.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi , maka dapat disimpulkan bahwa transmisi tidak optimal dilakukan, karena meskipun ada video, spantuk yang di pasang, Tetapi masih ada Masyarakat yang tidak mengetahuinya. Karena spanduk yang di pasang hanya pada Dinas Perhubungan saja, seharusnya dipasang pada jalan yang dilalui trayek tersebut supaya Masyarakat bisa melihatnya tidak harus ke Dinas Perhubungan .

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III (Agustino, 2014:149) Transmisi : Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan implementasi yang baik pula.

b. Kejelasan

Kejelasan dalam kebijakan sangat penting karena dapat menghindari kebingungan, kesalahpahaman, dan konflik yang mungkin timbul.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat peneliti simpulkan bahwa kejelasan yang terdapat dalam setiap peraturan yang dimaksud sudah jelas serta mudah dipahami bagi setiap Masyarakat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III (Agustino, 2014:149) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (kalimat-kalimat yang disampaikan tidak ambigu/bermakna mendua).

c. Konsistensi

Konsistensi dalam suatu kebijakan mengacu pada keselarasan dan kekonsistenan dalam penerapan kebijakan tersebut.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat peneliti simpulkan bahwa Peraturan Bupati Nomor 91 tahun 2021 tentang angkutan umum gratis tidak konsisten dilaksanakan sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 ini, karena melihat minimnya anggaran.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III (Agustino, 2014:149) Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

2. Sumber daya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumber daya. Menurut Edward III dalam sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari informasi dan fasilitas yang tersedia.

a. Staf

Peran staf dalam kebijakan sangat penting karena merekalah yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan tersebut dalam praktik sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa terkait staf belum baik karena kurangnya anggaran untuk menambah staf dan armada.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III (Agustino, 2014:149) Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi suatu kebijakan salah satunya dikarenakan oleh disebagian staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dalam bidangnya.

b. Informasi

Setiap kebijakan haruslah mengandung informasi dan pemberitahuan yang sejelas-jelasnya, apalagi yang berhubungan dengan kebijakan Pemerintah.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, dapat peneliti simpulkan bahwa kejelasan informasi yang terdapat dalam setiap pasal pada peraturan yang dimaksud sudah jelas serta mudah dipahami bagi setiap warga Masyarakat karena telah melalui observasi dan pemilahan yang lama dan matang.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III (Agustino, 2014:149) Informasi ada dua macam, yakni, Informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan; dan Informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturanpemerintah yang telah ditetapkan.

c. Wewenang

Wewenang memberikan kemampuan kepada individu atau kelompok untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat peneliti simpulkan bahwa kewenangan di jalankan sesuai yang ada di dalam peraturan kebijakan tersebut. Melakukan pengendalian transportasi: Dishub berperan dalam mengontrol arus kendaraan dan menentukan rute.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III (Agustino, 2014:149) Wewenang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakankebijakan yang telah ditetapkan secara politik.

d. Fasilitas

Fasilitas merupakan faktor penunjang yang juga sangat berpengaruh terhadap terhadap keberhasilan dalam suatu implementasi kebijakan. ketiadaan fasilitas pendukung tentu akan sangat mempengaruhi kinerja para petugas dalam menerapkan dan melaksanakan suatu kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, maka dapat peneliti simpulkan bahwa fasilitas yang tersedia pada dinas Perhubungan belum memadai untuk Angkutan/Armada, tidak mencukupikebutuhan masyakat.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III (Agustino, 2014:149) Fasilitas fisik akan sangat menunjang dalam implementasi suatu kebijakan

3. Disposisi

Disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinantujuan

kebijakan dapat diwujudkan.

a. **Pengangkatan Birokrasi**

Pengangkatan dan pemilihan personil untuk jabatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan merupakan wewenang Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pengangkatan birokrasi di jalankan sesuai yang ada di dalam peraturan kebijakan tersebut. Melakukan pengendalian transportasi: Dishub berperan dalam mengontrol arus kendaraan, menentukan rute, dan menyediakan infrastruktur transportasi yang dibutuhkan

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III (Agustino, 2014:149) Pengangkatan birokrasi, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan- hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan.

b. **Insentif**

Insentif merupakan bagian dari kompensasi khusus yang diberikan suatu perusahaan atau lembaga kepada karyawan di luar gaji utamanya

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa tidak ada pemberian intensif atau gaji tambahan yang diberikan karena sudah adanya gaji bulanan yang diberikan, dan untuk anggarannya saja masih kurang.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III (Agustino, 2014:149) Salah satu teknik yang disarankan Edward dalam mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif.

4. **Struktur Birokrasi**

Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta institusi pendidikan dan sebagainya

a. **Standar Operating Prosedur**

Standar Operasional Prosedur merupakan sebuah panduan yang bertujuan memastikan pekerjaan dan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya di lapangan para petugassudah menjalankan tugasnya dengan

optimal sesuai dengan *standar operation prosedur* yang diterbitkan. dan tidak berbuat semena-mena.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George Edward III (Agustino, 2014:149) SOP: Kebijakan yang begitu kompleks menuntut kerjasama banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menghambat jalannya kebijakan.

b. **Fragmentasi (Koordinasi antar Pelaksana Kebijakan)**

Koordinasi antar pelaksana tugas memang sangat diperlukan dengan adanya koordinasi antara atasan dan bawahan maka proses pelaksanaan tugas dapat lebih terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dapat disimpulkan bahwa terkait koordinasi yang dilakukan antara petugas atau pelaksana kebijakan sudah dilaksanakan dengan optimal, baik koordinasi antar sesama lembaga yaitu dengan lembaga lainnya, seperti melakukan Kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak lain, seperti Pt. Adaro Indonesia.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III (Agustino, 2014:149) *Fregmentas* yakni tak lain adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan birokrat diantara beberapa unit kerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Angkutan Umum Gratis (Studi Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan) sebagai berikut :

1. Kurangnya Armada Angkutan Terhadap Peraturan Bupati Balangan Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Angkutan Umum Gratis

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa faktor yang menghambat implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Angkutan Umum Gratis (Studi Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan) adalah kurangnya Armada atau angkutan umum gratis di Kabupaten Balangan, masih tidak optimal dikarenakan minimnya anggaran yang disediakan sehingga hal tersebut cukup menghambat tercapainya program kebijakan tersebut.

2. Kurangnya Anggaran Terhadap Peraturan Bupati Balangan Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Angkutan Umum Gratis

Hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor yang menghambat implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Angkutan Umum Gratis (Studi Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan) adalah kurangnya anggaran untuk menambah armada, sehingga ada beberapa titik di wilayah kabupaten Balangan yang belum terjangkau angkutan umum gratis.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Angkutan Umum Gratis belum optimal dilihat dari indikator : *Pertama* Transmisi peraturan belum optimal karena ada beberapa Masyarakat yang belum tahu, juga ada Masyarakat yang lebih suka menggunakan kendaraan pribadi karena dianggap lebih simple atau lebih mudah, *Kedua* kejelasan informasi yang terdapat dalam setiap pasal pada peraturan yang dimaksud sudah jelas serta mudah dipahami bagi setiap warga masyarakat, *Ketiga* keadaan fasilitas yang tersedia pada dinas Perhubungan belum lengkap dan tidak memadai untuk Angkutan/Armada, *Keempat* pengangkatan birokrasi sudah diterapkan sesuai aturan dan dilaksanakan dengan baik dan cukup Optimal, *Kelima* indikator insentif tidak ada pemberian intensif atau gaji tambahan yang diberikan karena sudah adanya gaji bulanan yang diberikan, menyebabkan mereka kurang bersemangat menjalankan tugasnya, tentu sangat berpengaruh terhadap berjalannya kebijakan tersebut, di karenakan minimnya anggaran. *Keenam* indikator SOP dalam melaksanakan tugasnya di lapangan para petugas sudah menjalankan tugasnya dengan optimal sesuai dengan *standar operation prosedur* yang diterbitkan. dan tidak berbuat semena-mena terhadap para pelanggar aturan, dan *KeTujuh* indikator fregmentasi koordinasi yang dilakukan antara petugas atau pelaksana kebijakan sudah dilaksanakan dengan optimal, baik koordinasi antar sesama lembaga yaitu dengan lembaga lainnya. Faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Angkutan Umum Gratis yaitu : Kurangnya Armada Angkutan Terhadap Peraturan Bupati Balangan Nomor 91

Tahun 2021 Tentang Angkutan Umum Gratis tidak optimal dikarenakan minimnya anggaran yang disediakan sehingga hal tersebut cukup menghambat tercapainya program kebijakan tersebut, dan kurangnya anggaran terhadap Peraturan Bupati Balangan Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Angkutan Umum Gratis, sehingga menjadi faktor penghambat dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*, Alfa Beta.
- Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.
- Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.
- Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.
- Affrian, R. and Walinda, R. (2020) 'Komunikasi Program Imunisasi Vaksin Measles Rubella Puskesmas Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 1(1), pp. 42–50.
- Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.
- Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.
- Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.
- Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administratus*, 8(2), pp. 56–68.
- Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.
- Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.
- Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.
- Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.
- Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG



PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.

Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.

Anggara, D. sahya (2014) 'Kebijakan Publik', *Kebijakan Publik* [Preprint], (1993).

Subarsono, A.G. 2009. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*.

Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung : CV.Afabeta

Tim Penyusun. 2022. *Pedoman Penyusun dan Penulisan Skripsi*. Amuntai : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Winarno. 2008. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS